Nomor SOP	
Tgl.Pembuatan	
Tgl.revisi	
Tgl.Pengesahan	
Disahkan oleh	
Nama SOP	SOP Failitasi Sengketa Informasi



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan			
1. UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;	1. PPID dan PPID Pelaksana memahami PERKI No.1 Tahun 2021 tentang Standar			
2. UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;	Layanan Informasi Publik;			
3. UU No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KIP;	2. PPID dan PPID Pelaksana memahami PERKI No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur			
4. PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KIP;	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;			
5. PERKI NO. 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;	3. Tenaga Pembantu Administrasi / Fungsional memiliki kewenangan dibawah PPID			
6. PERKI No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;	Utama maupun PPID Pembantu dan/atau petugas meja informasi memiliki			
7. PERMENDAGRI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan layanan informasi dan	kemampuan di bidang:			
Dokumentasi Kemendagri dan Pemda;	a. Memahami pendokumentasian dan kearsipan;			
8. PERDA No.2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur	b. Memahami dan dapat menguasai IT;			
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores	c. Memiliki sertifikasi tentang pelanyanan publik; dan			
Timur;	d. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung pelayanan informasi.			
9. PERBUP No.44 tahun 2017 tentang tata kerja PPID di lingkungan Kabupaten Flores Timur;	4. Petugas meja informasi memberikan layanan bagi pemohonan informasi sesuai			
10.PERBUP No.86 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas	dengan SOP.			
Komunikasi dan InformatikaKabupaten Flores Timur;				
11.KEPBUP No.46 Tahun 2021 tentang PPID Kabupaten Flores Timur.				
Keterkaitan:	Peralatan dan Perlengkapan			
SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik	1. Term of reference Komputer;			
	2. Lembar kerja & rencana kerja;			
	3. Komputer dan Jaringan Internet;			
	4. Meja informasi;			
	5. Telepon dan Fax;			
	6. Printer dan scanner;			
	7. Formulir pernyataan keberataan atas permohonan informasi			
	8. Nota dinas/surat; dan			
	9. Media Komunikasi (Telepon, Email, Website, WA dan SMS)			
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan			
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik,	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.			
maka dapat menimbulkan sengketa informasi.				

Prosedur:

No	Aktivitas	PELAKSANA				Mutu Buku			KETERANGAN
		Pemohon	Bagian	PPID Utama & PPID	Atasan PPID	Persyaratan	Waktu	Output	
		informasi	Registrasi	Pelaksana					
1	Mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID;					Formulir pengajuan keberatan informasi Publik dan fotocopy identitas diri dari pemohon	10x 24 Jam	Berkas permohonan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri.	
2	PPID Utama membuat tim fasilitas sengketa;		<u> </u>				1x24 jam	Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan.	
3	Menetapkan tim fasilitas sengketa;						1x24 jam		
4.	Melakukan mediasi terkait laporan keberatan informasi publik;						1x24 jam	Berita acara mediasi	
5.	Melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID;						1 x 24 jam	Berita acara mediasi	
6.	Menerima hasil mediasi sengketa informasi.						1 x 24 jam	Laporan hasil mediasi sengketa informasi	